

LAPORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

**BULAN JANUARI-APRIL
TAHUN 2021**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU
BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2021**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya sehingga Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai Besar PPMB-TPH tahun 2021 pada bulan Januari s.d bulan April dapat diselesaikan. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelayanan publik di Balai Besar PPMB-TPH.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik di Balai Besar PPMB-TPH. Melalui pengukuran SKM ini masyarakat berkesempatan menilai secara objektif kinerja untuk institusi, sehingga hasilnya dapat dijadikan acuan dalam peningkatan kinerja kedepan. Data survei kepuasan masyarakat dapat dijadikan bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan juga akan menjadi pendorong serta motivasi bagi petugas penyelenggara pelayanan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Balai Besar PPMB-TPH periode Januari-April Tahun 2021.

Depok, Mei 2021
Kepala Balai Besar,

Ir. Warjito, M.Si.
NIP 196307121989031017

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rumusan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan jelas dan terukur. Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Dituangkan pula Peraturan Menteri Pertanian No.19/Permentan/OT/080/4/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian.

Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Balai Besar PPMB-TPH) menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dimana pada laporan ini akan dipaparkan hasil SKM semester I yang telah dilakukan pada bulan Januari s.d April tahun 2020. Berdasarkan hasil survei dilapangan dengan cara para pengguna jasa layanan Balai Besar PPMB-TPH mengisi kuesioner secara online dengan alamat web ikm.pertanian.go.id. Berdasarkan hasil survei SKM diperoleh nilai SKM Balai Besar PPMB-TPH sebesar 93,75 dengan kategori **SANGAT BAIK**. Dari 9 (sembilan) unsur pelayanan yang disurvei, ada beberapa unsur pelayanan yang harus ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Unsur pelayanan yang memiliki nilai tertinggi yaitu unsur pelayanan Biaya/Tarif layanan dengan nilai 99, unsur kualitas sarana dan prasarana dengan nilai 99, dan unsur penanganan pengaduan dengan nilai 94 sedangkan unsur layanan yang memiliki nilai terendah yaitu unsur kecepatan waktu layanan dengan nilai 90, Posedur layanan dengan nilai 90.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Pelaksanaan	2
C. Tujuan dan Manfaat Survei	3
1. Tujuan	3
2. Manfaat.....	4
D. Metode Penarikan Sampel	4
E. Metode Pengukuran	4
F. Pengolahan Data	6
II. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SKM BALAI BESAR PPMB-TPH	
A. Rencana Tindak Lanjut SKM tahun 2021	10
B. Evaluasi Tindak lanjut SKM 2020	11
III. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	12
B. Saran	12
IV. PENUTUP	
Penutup	13

DAFTAR TABEL

	Hal
1. Interpretasi Hasil Pengukuran SKM.....	6
2. Pengolahan Data SKM terhadap 28 Responden.....	6
3. Nilai Per Unsur Pelayanan Pada Balai Besar PPMB-TPH.....	8
4. Rencana Tindak Lanjut unsur layanan terendah tahun 2021.....	10
5. Evaluasi Tindak lanjut Unsur Layanan Terendah Tahun 2020 sem II.....	10

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik Nilai Per Unsur Pelayanan pada Balai Besar PPMB-TPH.....	8

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor utama dalam mewujudkan pemerintahan bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah melaksanakan reformasi birokrasi. Prinsip-prinsip *Good Governance* seperti: partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum dan kesetaraan menjadi hal penting dalam penciptaan iklim birokrasi yang sehat. Dalam konteks pembangunan sistem administrasi negara, reformasi birokrasi sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu upaya sebagai tindak lanjut dari reformasi birokrasi adalah melaksanakan perbaikan layanan publik disatukan kerja Balai Besar PPMB-TPH. Kelembagaan ini dalam melakukan perbaikan layanan diawali dengan melakukan evaluasi terhadap kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan di kantor ini. Evaluasi yang berwujud pengukuran kepuasan pelanggan merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif. Apabila pelanggan merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan tidak efisien. Selain itu tingkat kepuasan pelanggan (masyarakat) dalam memperoleh layanan publik menjadi acuan penting untuk menilai kesungguhan Balai Besar dalam melakukan reformasi birokrasi. Dalam konteks ini, prinsip pelayanan yang mencakup: mudah, transparan dan tepat waktu bukan sekedar slogan, melainkan benar-benar menjadi kenyataan yang ditemui masyarakat ketika mereka ingin mendapatkan layanan yang baik.

Selama ini upaya perbaikan layanan dilakukan belum melibatkan assessment kebutuhan perbaikan terlebih dahulu. Sehingga perbaikan layanan terkesan dalam bentuk tindakan-tindakan sporadik yang tidak sesuai kebutuhan. Untuk itu pelaksanaan survey kepuasan masyarakat sebagai bagian dari assessment atas kebutuhan perbaikan menjadi hal yang tidak hanya perlu dilakukan, melainkan penting, karena dinamika selera dan preferensi pelanggan dalam hal ini masyarakat selalu berkembang. Upaya-upaya perbaikan perlu terus dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan karakteristik selera pasar yang berkembang. Dalam rangka penyesuaian itu harus ada indentifikasi kritis dalam bentuk *feed back* dari pelanggan langsung.

Penting, karena pelayanan publik harus ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Kualitas yang dimaksud adalah ketercapaian indikator-indikator mutu, sedangkan kuantitas yang dimaksud adalah daya jangkau layanan. Kesemuanya ini membutuhkan keterlibatan semua pihak dalam melakukan perbaikan layanan publik termasuk masyarakat yang berfungsi sebagai pelanggan layanan publik. Oleh sebab itu, survei ini juga merupakan opini publik terhadap layanan yang diberikan selama ini. Opini publik dimaksud disusun sampai dengan mendapatkan indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

B. Dasar Pelaksanaan

Dasar hukum pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah:

1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik;
2. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementrian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentangPentunjuk Teknis Penyusunan, penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementian Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survai Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.080/8/2017 tentang Pedoman Penilaian dan Kesesuaian Penerapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/4/2018 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan publik Lingkup Kementerian Pertanian;

C. Tujuan dan Manfaat Survei Kepuasan Masyarakat

1. Tujuan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/4/2018 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan publik Lingkup Kementerian Pertanian tujuan diadakannya survei kepuasan masyarakat adalah anatara lain:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Memperoleh informasi terukur indeks kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan dan informasi pada unit kerja yang memiliki pelayanan publik;
- c. Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dimaksudkan sebagai acuan bagi unit pelayanan instansi pemerintah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara berkala dan juga sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dimasa mendatang.

Selain itu survei kepuasan masyarakat juga bertujuan untuk:

- a. Tersusunnya data Kepuasan Masyarakat yang dibutuhkan untuk perbaikan mutu layanan kepada masyarakat;
- b. Mengetahui kelemahan dan kekurangan dari unsur-unsur pelayanan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna;
- d. Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik
- e. Mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan dalam menetapkan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya;
- f. Tersusunnya rekomendasi kepada pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik untuk melakukan pembinaan lebih lanjut terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Manfaat Survei Kepuasan Masyarakat

Manfaat Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan secara periode antara lain sebagai berikut:

- a. Menemukan kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian ditindaklanjuti dengan upaya-upaya perbaikan;
- b. Mendapatkan informasi kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
- c. Sebagai referensi perumusan kebijakan yang terkait dengan optimalisasi layanan publik di Balai Besar PPMB-TPH;
- d. Mendapatkan Survei kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat;
- e. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
- f. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan publik.

D. Metode Penarikan Sampel

Survei ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data primer melalui online dengan alamat web ikm.pertanian.go.id kepada pelanggan Balai Besar PPMB-TPH. Agar Survei Kepuasan Masyarakat ini dapat memberikan gambaran yang cukup representatif, maka cakupan (populasi) survei hanya pada instansi pemerintah (BPSB-TPH), usaha swasta perbenihan, peserta magang yang melakukan pengujian benih di Balai Besar PPMB-TPH

E. Metode Pengukuran

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman kepada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/4/2018 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan publik Lingkup Kementerian Pertanian. Berdasarkan pedoman tersebut metode yang digunakan

adalah survei dengan menggunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data. Responden dipilih secara acak untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan survei. Didalam kuesioner tersebut terdapat 9 unsur penting yang mencakup unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu:

1. **Persyaratan pelayanan**, yaitu persyaratan teknis dan administrasi yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
2. **Prosedur pelayanan**, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
3. **Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan**, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. **Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan**, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
5. **Kesesuaian Produk Pelayanan**, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam kesesuaian produk pelayanan dengan hasil maksimal yang diberikan
6. **Kemampuan petugas pelayanan**, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
7. **Kesopanan dan keramahan petugas**, yaitu sikap perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati
8. **Penanganan Pengaduan pengguna Layanan**, yaitu penanganan pengaduan pengguna layanan dapat memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan;
9. **Kualitas sarana dan Prasarana**, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;

Untuk memudahkan interpretasi terhadap hasil pengolahan data SKM, maka nilai SKM dihitung dengan menggunakan Nilai Rata-Rata Tertimbang dari masing-masing unsur pelayanan. Adapun kriteria hasil penilaian terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1: Interpretasi Hasil Pengukuran SKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,532 - 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

F. Pengolahan Data

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,111. Berikut ini adalah tabel Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 28 Responden dan Pengolahan Pelayanan Per Unsur Pelayanan semester I selama periode bulan Januari s.d April tahun 2021.

Tabel 2: Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 28 Responden

No. Responden	Nilai Per Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Responden 1	3	3	4	4	4	4	4	4	4
Responden 2	4	4	3	4	4	4	4	4	4
Responden 3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Responden 4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
Responden 5	3	4	4	4	4	4	4	4	4
Responden 6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Responden 7	3	3	3	4	3	3	3	4	4
Responden 8	3	3	3	4	4	3	4	4	4
Responden 9	3	3	3	4	3	3	3	4	4
Responden 10	3	3	4	4	3	3	4	4	4
Responden 11	4	3	3	4	4	3	3	4	4
Responden 12	3	3	3	4	3	3	3	4	4
Responden 13	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Responden 14	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Responden 15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Responden 16	4	3	3	4	3	3	3	4	4	
Responden 17	4	4	3	3	4	4	4	4	4	
Responden 18	4	4	3	3	4	4	4	4	4	
Responden 19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Responden 20	4	4	4	4	4	3	3	4	4	
Responden 21	4	4	4	4	3	3	4	4	4	
Responden 22	4	4	3	4	3	4	4	4	4	
Responden 23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Responden 24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Responden 25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Responden 26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Responden 27	3	3	4	4	4	4	4	4	4	
Responden 28	3	3	4	4	4	4	3	4	3	
Σ Nilai Per Unsur	102	101	101	111	104	102	104	111	109	
NRR Per Unsur	3,64	3,61	3,61	3,96	3,71	3,64	3,71	3,96	3,89	
NRR tertimbang per unsur	0,04	0,04	0,04	0,44	0,41	0,04	0,41	0,44	0,43	3,75
SKM UNIT PELAYANAN										**) 93,75

Keterangan :

U1 s.d U9: Unsur Pelayanan

NRR : Nilai Rata-Rata

IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat

*) : Jml NRR Tertimbang

**) : Jml NRR Tertimbang x 25

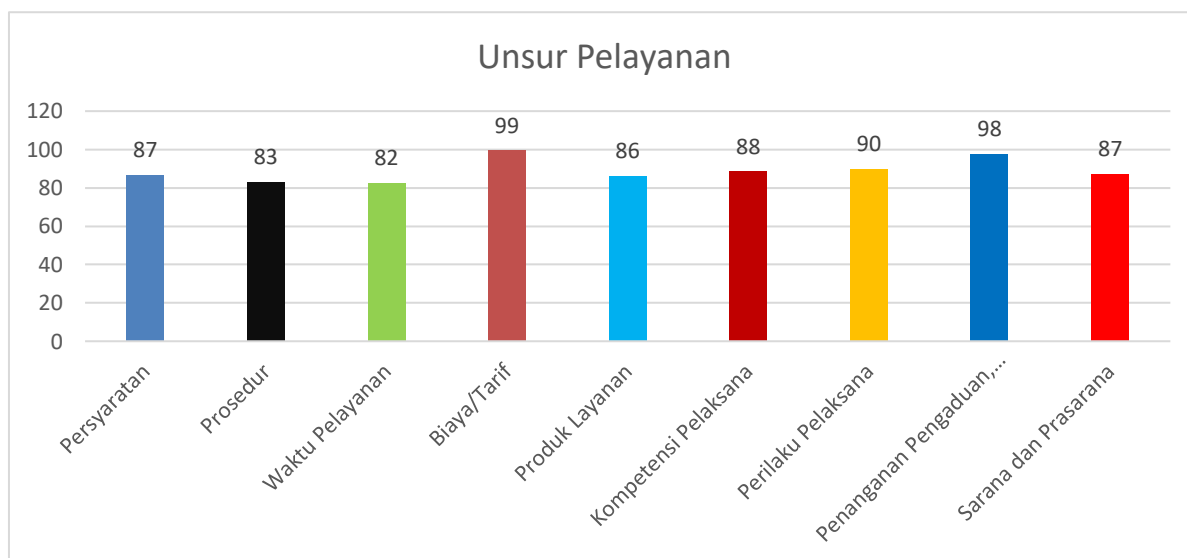
NRR Per Unsur : Jml Nilai per unsur dibagi Jml Kuesioner yang terisi

NRR Tertimbang Per Unsur = NRR Per Unsur x 0.11

Tabel 3: Nilai Per Unsur Pelayanan pada Balai Besar PPMB-TPH

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	NILAI PELAYANAN
U1	Persyaratan pelayanan	3.64	91
U2	Prosedur pelayanan	3.61	90
U3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3.61	90
U4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3.96	99
U5	Kesesuaian Produk Pelayanan	3.71	92
U6	Kemampuan petugas pelayanan	3.64	91
U7	Kesopanan dan keramahan petugas	3.71	92
U8	Kualitas sarana dan Prasarana	3.96	99
U9	Penanganan Pengaduan pengguna Layanan	3.89	97
Nilai Rata-Rata		3.75	93.75

Grafik 1 : Nilai Per Unsur Pelayanan pada Balai Besar PPMB-TPH



**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
BALAI BESAR PPMB-TPH CIMANGGIS
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
BULAN APRIL 2021**

NILAI IKM	NAMA UNIT : BALAI BESAR PPMB-TPH CIMANGGIS
94	RESPONDEN
	JUMLAH : 28 Orang
	JENIS KELAMIN : L : 12 Orang P : 16 Orang
	PENDIDIKAN : SD : - Orang
	SLTP : - Orang
	SLTA : 6 Orang
	DI/DII/DIII : 4 Orang
	S1 : 17 Orang
	S2 Keatas : 1 Orang
	Periode Survey: 04 Jan 2021 s/d 30 Apr 2021

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI
DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

NILAI IKM UNIT PELAYANAN

A (Sangat Baik): 88.51 - 100.00

B (Baik): 76.61 - 88.50

C (Kurang Baik): 65 - 76.60

D (Tidak Baik): 25 - 64.9

Berdasarkan pengisian kuesioner dan hasil pengolahannya data diperoleh nilai SKM Balai Besar PPMB-TPH sebesar 93,75 kategori **Sangat Baik** dengan **Mutu Pelayanan A**. Dari 9 (Sembilan) unsur yang dinilai menunjukkan bahwa Unsur pelayanan yang memiliki nilai tertinggi yaitu unsur pelayanan Biaya/Tarif layanan dan unsur kualitas sarana dan prasaranadengan nilai 99, sedangkan unsur layanan yang memiliki nilai terendah yaitu unsur layanan persyaratan pelayanan, dan Prosedur pelayanan dengan nilai 90.

II. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SKM

A. Rencana Tindak Lanjut SKM tahun 2021

Berdasarkan pengisian kuesioner dan hasil pengolahannya data diperoleh nilai SKM Balai Besar PPMB-TPH periode Januari s.d. April 2021 sebesar 93,75 kategori **Sangat Baik** dengan **Mutu Pelayanan A**. Dari 9 (Sembilan) unsur yang dinilai menunjukkan bahwa nilai yang tertinggi yaitu dengan nilai 99 yaitu Kewajaran biaya/tariff dalam pelayanan (unsur No 4 dan No 8). Sedangkan unsur pelayanan terendah adalah dengan nilai 90 yaitu unsur prosedur pelayanan dan unsur kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan (Unsur No 2, dan 3).

Berikut tabel tiga (2) unsur pelayanan dengan nilai SKM terendah dengan rencana tindak lanjutnya untuk meningkatkan nilai unsur layanan tersebut:

Tabel 4: Rencana tindak lanjut unsur layanan yang terendah SKM tahun 2021

No	Unsur Pelayanan	Nilai	Rencana Tindak Lanjut
1.	Prosedur Layanan	90	Akan diadakan sosialisasi prosedur pelayanan secara rutin minimal satu kali dalam satu tahun
2.	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	90	Monitoring diperkuat oleh subkoordinator/ penanggung jawab substansi, dan akan dibahas tentang rencana penambahan jam layanan dalam temu pelanggan pada kegiatan workshop sinkro Lab di Surabaya

B. Evaluasi Tindak Lanjut SKM 2020

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai Besar PPMB-TPH periode penilaian bulan Januari s.d November tahun 2020 sebesar 88,5 kategori Baik dengan mutu pelayanan B, Namun masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang harus ditingkatkan secara kuantitas maupun secara kualitas seperti unsur pelayanan terendah adalah persyaratan layanan (86), prosedur pelayanan (85) dan kecepatan waktu pelayanan (84,5)

Berikut kami tampilkan tabel tiga unsur pelayanan dengan nilai SKM terendah dengan rencana tindak lanjutnya untuk meningkatkan nilai unsur layanan tersebut:

Tabel 5: Evaluasi tindak lanjut unsur layanan yang terendah tahun 2020

No	Unsur Pelayanan	Nilai	Rencana Tindak Lanjut	Evaluasi
1.	persyaratan layanan	86	Akan dilakukan sosialisasi SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan) melalui web site dan pertemuan on line (Temu Pelanggan	Belum dilaksanakan, dan sudah direncanakan sosialisasi pada kegiatan workshop di surabaya, akan tetapi masih <i>dipending</i> karena situasi pandemi
2.	prosedur pelayanan	85	Kontak person melalui Hand Phone kantor untuk pelayanan pengujian	HP kantor (official) belum ada, prosedur telah dicantumkan dalam website
3.	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	84,5	Sosialisasi peningkatan pelayanan petugas penerima sampel, dan petugas yang terkait dengan pelayanan pengujian	Sudah dilakukan, akan tetapi belum efektif

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada Kantor Balai Besar PPMB-TPH adalah 93,75 ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik berada pada tingkatan/kategori SANGAT BAIK.
2. Untuk unsur-unsur pelayanan yang dinilai masih rendah dari unsur-unsur pelayanan yang lainnya akan menjadi perhatian dan akan dilakukan perbaikan pada semester berikutnya.
3. Unsur-unsur pelayanan yang dinilai Baik (B) akan dipertahankan dan akan ditingkatkan kelevel yang Sangat Baik (A).

B. Saran

1. Dalam rangka mewujudkan komitmen reformasi pelayanan publik kearah yang lebih baik, maka survei tentang opini publik tentang kepuasan masyarakat atas pelayanan di Balai Besar PPMB-TPH harus dilakukan secara berkesinambungan.
2. Perlu adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Balai Besar PPMB-TPH melalui pengadaan pegawai maupun pelatihan.
3. Perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan di Balai Besar PPMB-TPH.

IV. PENUTUP

Penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan di Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, (Balai Besar PPMB-TPH) sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Pusat dibidang pengujian mutu benih. Dari hasil pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat diharapkan instansi yang memberikan pelayanan mampu untuk memperbaiki kinerjanya dimasa mendatang.

